

PENGADILAN AGAMA METRO

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA METRO

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068

Metro - Lampung 34102

e-mail : pametro_lampung@yahoo.com

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Metro adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Metro, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

BUNYAMIN, S.Ag

NIP. 19680401 199203 1 004

Pengadilan Agama Metro

Jl. Stadion 24B, Tejoagung, Metro Timur Metro - Lampung 34102

Telp. 0725-45068 Fax. 0725-45068 e-mail :

pametro_lampung@yahoo.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Metro telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Metro, 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Anggaran,

BUNYAMIN, S.Ag

NIP. 19680401 199203 1 004

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	19
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	23
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	38
F. Pengungkapan Penting Lainnya.....	42

Lampiran dan Daftar

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 58.429.600. atau mencapai 521.69 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 11.200.000.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 66.000.000. atau mencapai 98.51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 67.000.0000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019. Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 3.241.245 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 3.241.245; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.241.245.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 58.429.600, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 73.124.245. sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. (14.694.645). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. (14.694.645).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 5.469.490. ditambah Surplus-LO sebesar Rp. (14.694.645) dikurang dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 12.466.400, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp. 3.241.245.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019		%	31 Desember 2018
		ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	11,200,000	58,429,600	521.69	106,642,000
JUMLAH PENDAPATAN		11,200,000	58,429,600	521.69	106,642,000
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	0.00	-
Belanja Barang	B.4	67,000,000	66,000,000	98.51	96,700,000
Belanja Modal	B.5	-	-	0.00	-
JUMLAH BELANJA		67,000,000	66,000,000	98.51	96,700,000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**PENGADILAN AGAMA METRO
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2019	TA 2018
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Persediaan	C.9	3,241,245	5,469,490
Persediaan Belum Diregister	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		3,241,245	5,469,490
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		3,241,245	5,469,490
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.27	3,241,245	5,469,490
JUMLAH EKUITAS		3,241,245	5,469,490
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3,241,245	5,469,490

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA METRO LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	58,429,600	106,642,000
JUMLAH PENDAPATAN		58,429,600	106,642,000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	7,124,245	7,601,110
Beban Barang dan Jasa	D.4	36,000,000	37,900,000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	30,000,000	58,800,000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		73,124,245	104,301,110
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(14,694,645)	2,340,890
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	2,340,890
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(14,694,645)	2,340,890

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**PENGADILAN AGAMA METRO
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018
EKUITAS AWAL	E.1	5,469,490	5,688,410
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(14,694,645)	2,340,890
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.1	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.2	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.4	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.5	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	12,466,400	(2,559,810)
EKUITAS AKHIR	E.5	3,241,245	5,469,490

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Metro

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Visi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA METRO YANG AGUNG dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Agama Metro sebagai berikut:

Misi Pengadilan Agama Metro adalah Pengadilan Agama Metro menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas pimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Metro menetapkan tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan.
2. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Metro yang professional, bersih dari KKN, transparan, efektif, efisien dan akuntabel.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Agama Metro.
4. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Lalu dari tujuan strategis di atas ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.

2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 31 Desember 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Agama Metro. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Pengadilan Agama Metro menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis

kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Pengadilan Agama Metro dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 31 Desember 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Pengadilan Agama Metro. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Metro adalah sebagai berikut:

*Pendapatan
-LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode

tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara

pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat

berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
- b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai

kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

B.1 Pendapatan

*Pendapatan
Rp.*

58.429.600

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 58.429.600 atau mencapai 521.69 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.11.200.000. Keseluruhan

Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Metro adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 Desember 2019		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	-	1,036,000	0.00%
Pendapatan Ongkos Perkara	-	18,540,000	0.00%
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	11,200,000	38,853,600	346.91
Jumlah	11,200,000	58,429,600	521.69

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 45.21% dibandingkan 31 Desember 2018. Hal ini disebabkan karena menurunnya Pendapatan Ongkos Perkara.

Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2019	REALISASI 31 DESEMBER 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Negara Bukan Pajak	58,429,600	106,642,000	(45.21)
Jumlah	58,429,600	106,642,000	(45.21)

*Realisasi
Belanja
Negara Rp.
66.000.000*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja Negara pada Per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 66.000.000 atau 98.51% dari anggaran belanja sebesar Rp. 67.000.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
31 Desember 2019*

Uraian	31 Desember 2019		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	67,000,000	66,000,000	98.51
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	67,000,000	66,000,000	98.51
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	67,000,000	66,000,000	98.51

Dibandingkan dengan 31 Desember 2018, Realisasi Belanja 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 31.75% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain : menurunnya jumlah Pagu Anggaran Belanja Barang.

Perbandingan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	0	0	0
Belanja Barang	66,000,000	96,700,000	(31.75)
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	66,000,000	96,700,000	(31.75)

Belanja Pegawai Rp. 0

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang.

*Perbandingan Belanja Pegawai
31 Desember 2019 dan 2018*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	0	0	0
Belanja Honorarium	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Vakasi	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

Belanja

*Barang Rp.
66.000.000.*

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 66.000.000 dan Rp. 96.700.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar 12,22% dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2018. Hal ini antara lain disebabkan karena menurunnya Pagu belanja barang.

Perbandingan Belanja Barang

Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,000,000	7,000,000	0.00
Belanja Barang Operasional Lainnya	0	1,200,000	(100.00)
Belanja Perjalanan Biasa	30,000,000	58,800,000	(48.98)
Belanja Jasa Konsultan	29,000,000	29,700,000	(2.36)
Jumlah Belanja Kotor	66,000,000	96,700,000	(31.75)
Pengembalian Belanja	0	0	0.00
Jumlah Belanja	66,000,000	96,700,000	(31.75)

Belanja Modal

Rp. 0.

B.2.3 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	Realisasi 31 Desember 2019	Realisasi 31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0.00
Pengembalian	0	0	0.00
Jumlah Belanja	0	0	0.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp. 0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut :

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Uang Tunai	0	0
BRI Cabang Metro A/C 00000130.01.000084.30.8	0	0
Jumlah	0	0

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp. 0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0. Kantor Pengadilan

Agama Metro tidak mempunyai rekening Bendahara Penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Uang Tunai	0	0
Uang di Bank	0	0
Jumlah	0	0

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.0.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Keterangan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	0	0
Jumlah	0	0

Persediaan
Rp. 3.241.245.

C.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.241.245 dan Rp. 5.469.490.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

*Rincian Persediaan
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

Jenis	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Barang Konsumsi	5,469,490	6,084,866
Barang untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Bahan Baku	0	0
Jumlah	5,469,490	6,084,866

Tanah
Rp. 0

C.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Pengadilan Agama Metro per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah per 31 Desember 2019

No	Luas	Peruntukan	Nilai
1	0	-	0
Jumlah			0

Peralatan dan
Mesin Rp. 0.

C.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp. 0. dan Rp. 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang :	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Gedung dan
Bangunan
Rp. 0.

C.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah :	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp.
0

C.8 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp. 0.

C.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp. 0*

C.10 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak terdapat KDP pada kantor Pengadilan Agama Metro.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap Rp.
0*

C.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
31 Desember 2019*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0	0	0
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Akumulasi Penyusutan		0	0	0

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak

Berwujud Rp.0

C.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Kantor Pengadilan Agama Metro berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2019	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Aset Lain-Lain

Rp. 0

C.13 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi tambah:	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 31 Desember 2019	0
Akumulasi Penyusutan	0
Nilai Buku per 31 Desember 2019	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp. 0*

C.14 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	0	0	0
Jumlah	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

*Uang Muka
dari KPPN*

C.15 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2019

Rp.0

dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp. 0

C.16 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Kantor Pengadilan Agama Metro per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Listrik	0	-
Belanja Gaji Pokok PNS	0	-
Belanja Tunjangan Anak PNS	0	-
Belanja Tunjangan Suami / Istri PNS	0	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	-
Total	0	-

Ekuitas

Rp. 3.241.245

C.17 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.241.245 dan Rp. 5.469.490. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan
PNBP Rp.
58.429.600

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 58.429.600 dan Rp. 106.642.000. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	-	-	-
Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	1,036,000	570,000	81.75
Pendapatan Ongkos Perkara	18,540,000	72,440,000	(74.41)
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	38,853,600	33,632,000	15.53
Jumlah	58,429,600	106,642,000	(45.21)

Beban
Pegawai Rp. 0

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN)
Beban Gaji	0	0	0.00
Beban Tunjangan-tunjangan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban

D.3 Beban Persediaan

Persediaan Rp.
7.124.245

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar 7.124.245 dan Rp. 7.601.110. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	7,124,245	7,601,110	93.73
Beban Pita Cukai, Materai, Leges	0	0	0
Jumlah	7,124,245	7,601,110	93.73

Beban Barang
dan Jasa Rp.
36.000.000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 36.000.000 dan Rp. 37.900.000. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi

belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban barang non operasional lainnya	7,000,000	7,000,000	0.00
Beban barang operasional lainnya	-	1,200,000	0.00
Beban Jasa Konsultan	29,000,000	29,700,000	(2.36)
Jumlah	36,000,000	37,900,000	(5.01)

Beban

Pemeliharaan

Rp. 0

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan beban pemeliharaan karena meningkatnya jumlah pagu anggaran yang digunakan untuk renovasi gedung kantor dan rumah dinas. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan

31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0.00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban

Perjalanan

Dinas Rp.

D.6 Beban Perjalanan Biasa

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.

30.000.000

30.000.000 dan Rp. 58.800.000. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh meningkatnya jumlah Undangan dan konsultasi yang dibebankan pada DIPA kantor.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2018	31 Desember 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	30,000,000	58,800,000	(48.98)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	0	0.00
Jumlah	30,000,000	58,800,000	(48.98)

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban untuk diserahkan pada masyarakat.

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

Beban Bantuan Sosial Rp. 0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai Beban Bantuan Sosial.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 0

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak

mempunyai beban penyusutan dan amortisasi

Beban

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih Rp. 0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Dalam hal ini, Kantor Pengadilan Agama Metro tidak mempunyai beban penyisihan piutang tak tertagih.

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional

Rp. 0

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional periode per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sejumlah Rp. 0.

Rincian Kegiatan Non Operasional Periode per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0.00
Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya	0	0	0.00
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	0	0	0.00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	0	0.00

**)Pendapatan/BebanPenyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO).*

Pos Luar Biasa **D.12 Pos Luar Biasa**

Rp. 0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Pos Luar Biasa sebagai berikut:

*Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018*

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Pendapatan PNB	0	0	0.00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0.00
Beban Persediaan	0	0	0.00
Jumlah	0	0	0.00

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal **E.1 Ekuitas Awal**

Rp. 5.469.490

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.469.490 dan Rp. 5.688.410.

Defisit LO **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Rp. (14.694.645)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2017 adalah sebesar Rp. (14.694.645) dan Rp. (2.340.890). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian **E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Aset

Rp. 0

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember

2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp.
0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

*Selisih
Revaluasi Aset
Tetap Rp.0*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Koreksi Nilai
Aset Tetap Non
Revaluasi Rp. 0*

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Rincian Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
per 31 Desember 2019*

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	0

*Koreksi Lain-
Lain Rp. 0*

E.3.5 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

*Transaksi Antar
Entitas Rp.
12.466.400*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.466.400 dan Rp. (2.559.810). Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	66,000,000
Diterima Dari Entitas Lain	(58,429,600)
Transfer Masuk	4,896,000
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0
Jumlah	12,466,400

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Ditagihkan ke Entitas lain Rp. 66.000.000. Diterima dari Entitas lain Rp. (58.429.600)

E.4.1 Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)/ Diterima dari Entitas Lain (DDEL)

Diteima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DKEL sebesar Rp. 66.000.000. sedangkan DDEL sebesar Rp. (58.429.600)

Transfer masuk Rp. 4.896.000 dan Transfer Keluar Rp. 0

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 4.896.000 terdiri dari :

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Blanko Akta Cerai	0	4,896,000
	Jumlah	0	4,896,000

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.

Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 0.

Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung Rp. 0

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah Rp. 0

Ekuitas Akhir Rp. 3.241.245

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.241.245 dan Rp. 0.

F.PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian-kejadian yang penting apapun setelah tanggal neraca di satuan Kerja Pengadilan Agama Metro untuk periode per 31 Desember 2019 yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN :

F.2.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK sampai dengan 31 Desember 2019.

F.2.2 Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Metro adalah:

- BRI CABANG METRO A/C 13001000708300 A.N. Bpg 126 PA METRO 04 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0.
- BNI SYARIAH CABANG TANJUNG KARANG A/C 5599662228 A.N. RPL PDT PA METRO UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan untuk menampung dana titipan pihak ketiga dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 12.940.000,-.

F.2.3 Revisi DIPA dc

Pada Periode yang berakhir 31 Desember 2019 Satuan Kerja Pengadilan Agama Metro terdapat Revisi DIPA sebanyak 4 (empat) kali revisi, yaitu :

1. Revisi ke-1, tanggal 29 Maret 2019, terdapat pergantian Nama PPSPM dari an. ABDUL WAHID AZIZ, S.Kom menjadi MEDI EFENDI, S.Pd., M.H. serta adanya perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Januari sampai dengan Desember 2019.
2. Revisi ke-2, tanggal 26 Juni 2019, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari

bulan April sampai dengan Desember 2019.

3. Revisi ke-3, tanggal 30 September 2019, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Juli sampai dengan Desember 2019.
4. Revisi ke-4, tanggal 19 November 2019, terdapat perubahan nilai pada Rencana Penarikan Dana dari bulan Oktober sampai dengan Desember 2019.

F.2.4 Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada ralat SPM, SSBP dan SSPB sampai dengan 31 Desember 2019.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk tahun 2019 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

F.2.5 Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat catatan penting pada kantor Pengadilan Agama Metro untuk tahun 2019 yang dapat diungkapkan pada Laporan keuangan ini.

PENGADILAN AGAMA METRO
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan,
Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akm. Peny. Per 31 Desember 2019	Beban Peny. per 31 Desember 2019	Akm. Peny. Per 31 Desember 2019	Nilai Buku Per 31 Desember 2019
A	Peralatan dan Mesin	-	0	0	0	0	0
B	Gedung dan Bangunan	-	0	0	0	0	0
C	Jalan	-	0	0	0	0	0
D	Jaringan	-	0	0	0	0	0
E	Aset Tetap lainnya	-	0	0	0	0	0
F	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan	-	0	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			0	0	0	0	0
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tetap lainnya			0	0	0	0	0

* Beban Amortisasi